

## **PARTISIPASI PETANI DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA LABUAN TOPOSO KECAMATAN LABUAN KABUPATEN DONGGALA**

Merki Natasya Sagita<sup>1)</sup>, Akhbar<sup>2)</sup>, Hasriani Muis<sup>2</sup>

Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Tadulako Jl. Soekarno-Hatta Km.9  
Palu, Sulawesi Tengah 94118

<sup>1)</sup>Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako  
Korespondensi: Merkinatasya96@gmail.com

<sup>2)</sup> Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako

### **ABSTRACT**

Community Forestry (HKm) is a state forest aimed at empowering, increasing the capacity and independence of local communities to obtain the benefits of forest resources optimally and fairly. Community forest management is one solution to improve community welfare and is a concrete form of community participation in the implementation of forestry development. Community participation in community forest management is one of the social capital that has been developed integratively through various creative activities in order to utilize natural resources sustainably and sustainably. The purpose of this study was to determine the level of participation of community forest farmers in Labuan Toposo Village, Labuan Subdistrict, Donggala Regency. The method used in this study is descriptive method. Data collection is done by observation or direct observation in the field and conducting interviews with farmers (Respondents). The population in this study were farmers in Labuan Toposo Village. Sampling in this study using purposive sampling method or with intentional namely by selecting farmers who are members of the Sisere Jaya Forest Farmer Group with 30 respondents. The research data analysis was used to answer the research objectives that had been made using quantitative descriptive and qualitative descriptive analysis. The level of participation in Community Forest Management is classified as high with a percentage of 76.67%, and the level of participation of farmers in community forest management is at the planning stage of entering the Partnership level. Power is channeled between government negotiations and farmers. The government imposes farmers as work partners, they together work together in compiling and implementing work programs.

**Keywords:** *Community Forestry, Participation, Forest Farmers, Forest Management*

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya, ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat (meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil. Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara, lestari serta memecahkan persoalan ekonomis dan sosial yang terjadi di masyarakat (Anonim, 2007).

Hutan Kemasyarakatan menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan untuk menekan laju deforestasi di Indonesia dengan melibatkan masyarakat, di samping Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat. Banyak pihak memandang kebijakan ini

sebagai pengakuan negara terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat yang selama ini terabaikan, namun mampu menjaga kelestarian alam dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagi masyarakat, hutan tak hanya memiliki makna ekologis, tetapi juga sosial, budaya dan ekonomi.

Provinsi Sulawesi Tengah melalui data BPS Provinsi Sulawesi Tengah (2015)

menyatakan bahwa luas wilayah hutan Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 4.724.687 Ha, yang menyebar diberbagai kabupaten. Yang terdiri atas Hutan Lindung 1.276.087 Ha, Hutan Produksi Tetap 401.454 Ha, Hutan Produksi Terbatas 1.390.971 Ha, Hutan Produksi yang Dapat Di Konversi 217.322 Ha, dan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 988.493 Ha.

Berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala Dalam Angka Tahun 2011 tercatat luas kawasan hutan sekitar 527.569 ha, maka luas kawasan hutan negara tercatat sebesar 302.257 ha serta hutan rakyat sebesar 225.312 ha. Sedangkan untuk kawasan budidaya tercatat sebesar 166.168 ha, yang terdiri atas lahan sawah sebesar 14.055 ha, lahan perkebunan 70.943 ha, tambak 3.635 ha, ladang 28.412 ha serta lahan yang tidak diusahakan 26.868 ha.

Program Hutan Kemasyarakatan ini dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hutan lindung yang terlanjur dibuka oleh masyarakat setempat melalui penanaman Tanaman Serba Guna (Multi Purpose Trees Spesies) dan kawasan hutan produksi yang dapat ditanam dengan tanaman kayu kayuan yang dapat diambil hasilnya dengan berpijak pada peraturan peratutum yang telah ditetapkan. Melalui program ini lahan yang semula terbuka bisa tertutup kembali oleh Tanaman Serba Guna (Multi Purpose Trees Spesies) dan masyarakat dapat mengambil manfaat dari hasil Tanaman Serba Guna (Multi Purpose Trees Spesies) tersebut (Arsyad, I dan S. Rahaijo. , 2004).

Pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan merupakan salah satu modal sosial yang dikembangkan secara integratif melalui berbagai kegiatan kreatif dalam rangka memanfaatkan sumberdaya alam yang ada secara lestari dan berkelanjutan.

Konsep partisipasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana petani hutan kemasyarakatan terlibat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, seberapa tinggi keterlibatannya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tingkat partisipasi petani dapat tercermin dalam berbagai tahapan kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan Tahapan pengelolaan terdiri atas tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Partisipasi petani pada pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat berbentuk ide/gagasan/pemikiran, biaya, maupun tenaga.

Faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi petani hutan rakyat dapat berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.(Diniyati dan Awang, 2010), faktor internal petani meliputi: umur, pendidikan formal/ nonformal, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan usaha tani, dan pekerjaan sampingan.(Muis, 2007). Faktor eksternal meliputi: penyuluhan kehutanan, dan sumber informasi (Fauzi, 2009). Partisipasi petani dalam mengelola hutan rakyat merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengelolaan hutan rakyat sehingga pengelolaan hutan rakyat dapat berkembang secara lestari dan berkelanjutan.(Waskito, 2010)

## **METODE PENELITIAN**

### **Waktu Dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yakni pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2018. Lokasi penelitian bertempat hutan kemasyarakatan yang berada di desa Labuan Toposo kecamatan Labuan kabupaten Donggala.

### **Bahan dan Alat**

1. Alat tulis berfungsi untuk menulis (mencatat) informasi yang di berikan oleh responden.
2. Kamera berfungsi untuk mendokumentasikan data saat pelaksanaan penelitian sebagai bukti adanya penelitian.
3. Tape recorder berfungsi merekam proses pengambilan data (wawancara) bersama responden/informan.

Pada penelitian ini bahan yang digunakan yaitu : kuisisioner dan panduan pertanyaan.

1. Kuisisioner disusun dari sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam hal ini kelompok tani hutan yang terkait dengan partisipasi petani dalam pengelolaan.
2. Panduan pertanyaan digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek – aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list) apakah aspek – aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan dan diperuntukan bagi tokoh kunci informan.

### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden atau objek yang diteliti, data primer pada penelitian ini meliputi data yang terkait dengan tingkat partisipasi dan data yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yakni telah lebih dulu dikumpulkan oleh orang atau instansi diluar peneliti sendiri. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi instansi atau kajian pustaka berupa kajian literatur artikel dan jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan

### Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan metode wawancara.

#### 1. Metode Observasi

Metode observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan

pengamatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang terdapat pada objek penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran mengenai keadaan daerah penelitian yang kemudian mengoperasikannya dengan data sekunder. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang lokasi penelitian dan responden penelitian.

#### 2. Metode Wawancara

Menurut Nasution (dalam Pabundu Tika 2005: 49), wawancara adalah suatu bentuk

komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan cara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar. Wawancara dilakukan untuk mengetahui partisipasi petani dalam pengelolaan hutan rakyat hutan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan baik faktor internal maupun eksternal.

### Analisis Data

Tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan tabulasi yang merepresentasikan jumlah dan persentase. Deskriptif kuantitatif yang disajikan dalam bentuk Distribusi Frekuensi untuk menjelaskan karakteristik responden dan partisipasi masyarakat.dalam hal ini kegiatan penyuluhan, kelompok tani hutan, dan akses informasi. Untuk menganalisis tingkat atau level partisipasi masyaarakat dilakukan secara deskriptif kualitatif berdasarkan pada indikator Pengukuran partisipasi masyarakat dilihat dari derajat wewenangnya dalam pengambilan keputusan dan digolongkan menjadi tingkatan non partisipasi, tokenisme dan citizen power oleh Arnstein (1969). Berikut akan dipaparkan penjelasan dari tangga partisipasi menurut Arnstein (1969).

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurut Tangga Partisipasi Arnstein.

Tangga Partisipasi	Hakekat Kesertaan	Tingkat Pembagian Kekuasaan
Manipulasi ( <i>manipulation</i> )	Permainan oleh pemerintah	Tidak ada partisipasi
Terapi ( <i>teraphy</i> )	Sekedar agar masyarakat tidak marah/ mengobati	
Pemberitahu an ( <i>informing</i> )	Sekedar pemberitahu an	Tokenisme / sekedar Justitifikasi

	searah/sosialisasi	agar mengiyakan
<b>Konsultasi (consultation)</b>	Masyarakat didengar, tapi tidak selalu dipakai sarannya	
<b>Penentrman (placation)</b>	Saran masyarakat diterima, tapi tidak selalu dilaksanakan	
<b>Kemitraan (partnership)</b>	Timbal balik di negosiasikan	Tingkat Kekuasaan ada
<b>Pendelegasian kekuasaan (delegated power)</b>	Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program)	dimasyarakat
<b>Kontrol masyarakat (citizen control)</b>	Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat	

(Sumber : Wicaksono 2010)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden (Faktor Internal)

Karakteristik responden adalah gambaran keadaan responden yang terdiri atas umur, pendidikan, pendapatan, masa kerja, jam kerja, dan jumlah anggota keluarga (Corry, 2008). Karakteristik Responden merupakan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat (Petani) dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Berdasarkan data yang dikumpulkan utamanya data primer yaitu hasil wawancara terstruktur (Kuisisioner) dan tak terstruktur (Interview) serta observasi langsung kelokasi, di ketahui karakteristik responden meliputi : Umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan, dan Luas Lahan.

#### a. Umur

Umur merupakan salah satu indikator untuk mengetahui karakteristik responden, umur juga menentukan keahlian atau pengetahuan petani dalam bertani selain itu semakin tinggi usia maka keputusan dalam bertindak juga akan semakin baik (Nurani, 2013).

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan kerja dan produktifitas seseorang. Seseorang akan mengalami peningkatan kemampuan kerja seiring dengan meningkatnya umur, akan tetapi selanjutnya akan mengalami penurunan kemampuan kerja pada titik umur tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka dikenal adanya umur produktif dan umur nonproduktif. Umur produktif adalah umur dimana seseorang memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk maupun jasa. Chamdi (2003) mengemukakan bahwa usia produktif 20 – 45 tahun masih memiliki semangat yang tinggi dan mudah mengadopsi hal-hal baru. Berbeda dengan petani peternak yang telah berusia lanjut (di atas 50 tahun) Soekartawi (2003) dalam bukunya menyatakan bahwa mereka yang berusia lanjut cenderung fanatik terhadap tradisi dan sulit untuk diberikan pengertian-pengertian yang dapat mengubah cara berfikir, cara kerja dan cara hidupnya.

Tabel 2. Kategori Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.

Umur (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Rendah (<39)	8	26.67
Sedang (39-45)	16	53.33
Tinggi (>45)	6	20
Total	30	100

(Sumber : Hasil Analisis, 2019)

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar reponden berumur 39-45 tahun yaitu sebanyak 16 orang atau sekitar 53.33% dari jumlah responden. Hal ini menandakan bahwa petani di Desa Labuan Toposo berada pada umur produktif sehingga memungkinkan bagi para petani tersebut dapat berkerja lebih baik, bersemangat, serta mempunyai motivasi yang tinggi. Sementara responden yang berusia 45 keatas tergolong sedikit. Hal ini dikarenakan faktor usia yang kurang mampu untuk melakukan tugas-tugas yang dilakukan.

#### b. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap seseorang

terhadap suatu kegiatan. Masyarakat dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung untuk memiliki tingkat kehidupan yang lebih baik, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan juga mempengaruhi wawasan dan cara berfikir seseorang. Pendidikan membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk dapat mengerjakan sesuatu lebih cepat dan tepat, dengan demikian semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin besar kinerja yang dicapai (Mamahit, 2013).

Dalam penelitian ini tingkat pendidikan dikategorikan menjadi tiga yaitu rendah, sedang, tinggi. Tingkat pendidikan yang tergolong rendah meliputi: SD dan SMP, untuk kategori sedang meliputi: SMA, sedangkan untuk kategori tinggi meliputi: Diploma, dan Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kategori Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Kategori Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Rendah	18	60
Sedang	10	33.33
Tinggi	2	6.67
Total	30	100

(Sumber : Hasil Analisis, 2019)

Tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden Desa Labuan Toposo sangat rendah yaitu 60% dari responden hanya berpendidikan SD dan SMP. Hal ini merupakan salahsatu faktor penghambat dalam pengembangan usaha tani. Sesuai pendapat Risqina (2011) bahwa pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan pengatur manajemen dalam mengelola suatu usaha. Dengan adanya pendidikan dapat mempermudah dalam menerima atau mempertimbangkan suatu inovasi yang dapat membantu mengembangkan usaha menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga peternak tidak

mempunyai sifat yang tidak terlalu tradisional.

### c. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota keluarga yang masih jadi tanggungan kepala keluarga dengan menggunakan satuan orang (Widyawati, 2013). Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya orang yang berada di dalam manajemen rumah tangga di luar kepala rumah tangga. Dengan demikian yang termasuk dalam tanggungan keluarga yaitu istri, anak, dan keluarga lainnya yang ikut serta tinggal bersama. Tindakan responden dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarga akan di penngaruhi oleh jumlah tanggungan keluarganya. Untuk lebih jelasnya, keadaan jumlah tanggungan keluarga dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kategori Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Jumlah Tanggungan Keluarga (Orang)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Rendah (<3)	2	6.67
Sedang (3-4)	20	66.67
Tinggi (>4)	8	26.67
Total	30	100

(Sumber : Hasil Analisis, 2019)

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga responden mempunyai jumlah tanggungan keluarga termasuk pada kategori sedang , yaitu mempunyai tanggungan antara 3-4 orang sebanyak 20 (66.67%) .

Jumlah tanggungan keluarga juga sangat berpengaruh terhadap partisipasi petani, hal ini disebabkan karena jumlah keluarga yang harus ditanggung maka petani harus berkerja ekstra guna menambahkan pendapatan keluarga.

### d. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan responden dikelompokkan kedalam tiga kategori yaitu: rendah (<Rp2.000.00), sedang (Rp 2.000.000 – 3.000.000), dan tinggi (>Rp 3.000.000) sesuai dengan daerah tinggal. Pendapatan di desa Labuan Toposo bersumber dari dua pendapatan yaitu pendapatan usaha tani dan diluar usaha tani. Pendapatan keluarga adalah seluruh hasil yang diterima responden dan keluarganya dari kegiatan usaha tani mau non usaha tani (Rp/bulan).

Tabel 5. Kategori Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan.

Tingkat Pendapatan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Rendah (<Rp.2.000.000)	11	36.67
Sedang (Rp.2.000.000 - Rp.3.000.000)	18	60
Tinggi (>Rp.3.000.000)	1	3.33
Total	30	100

(Sumber : Hasil Analisis, 2019)

Tabel 9 menunjukkan tingkat pendapatan responden adalah termasuk pada kategori tinggi >Rp.3.000.000,- dengan jumlah responden 1 orang (3.33%) , sebanyak 18 orang responden termasuk kategori sedang (60%) dengan pendapatan Rp.2.000.000, - Rp.3.000.000, dan sebanyak 11 orang responden (36.67%) termasuk kategori rendah dengan pendapatan <Rp.2.000.000

Tingkat pendapatan dipengaruhi oleh luas lahan garapan dan cara pengolahan lahan. Penduduk desa Labuan Toposo tingkat pendapatannya relatif baik karena berdasarkan pengamatan di lapangan lahan yang mereka garap relatif luas dan pengolahannya sangat baik, penduduk dapat memaksimalkan hasilnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokok perbulan.

#### e. Luas Kepemilikan Lahan

Luas lahan yang dimiliki berpengaruh terhadap pilihan sikap seseorang dalam memutuskan untuk mengalokasikan sebagian lahannya untuk ditanami pohon-pohonan. Luas pemilikan lahan dapat menjadi faktor pendukung dalam peningkatan prestasi kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Derby dkk, 2012). Hal tersebut berlaku sebaliknya, pemilikan lahan yang lebih sempit lebih cenderung menggunakan lahannya untuk tanaman pangan atau tanaman perdagangan daripada pohon-pohonan (Suharjito dkk, 2003) dalam (Hasriani 2007). Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Kategori Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Kepemilikan Lahan.

Luas Lahan (Ha)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Kecil(<1.5)	8	30

Sedang (1.5-2)	15	30
Luas(>2)	7	40
Total	30	100

(Sumber : Hasil Analisis, 2019)

Tabel 6 menunjukkan bahwa bahwa lahan yang dikuasai oleh tiap-tiap responden di lokasi berbeda. Kisaran luas lahan yang di kuasai oleh responden adalah sebesar 1 – 3 Ha, dengan rata-rata seluas 2 Ha.

#### Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM)

Faktor eksternal merupakan faktor yang menekan seseorang yang berasal dari luar dirinya, dan merupakan salahsatu faktor penting untuk mengetahui upaya seseorang dalam melakukan suatu usaha aktivitas. Faktor eksternal yang diamati adalah : 1) Penyuluhan Kehutanan, 2) Kelompok Tani Hutan dan 3) Akses Informasi. Setiap Faktor Eksternal di kategorikan menjadi rendah, sedang, tinggi.

#### a. Tingkat Partisipasi Petani Dalam Kegiatan Penyuluhan

Penyuluhan pertanian berperan penting bagi pembangunan pertanian, sebab penyuluhan merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lain untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraanya. Oleh karena itu kegiatan penyuluhan pertanian harus dapat mengakomodasikan aspirasi dan peran aktif petani dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui pendekatan partisipatif.

Tabel 7. Tingkat Partisipasi Dalam Kegiatan Penyuluhan.

Tingkat Partisipasi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Rendah	0	0
Sedang	26	86.7
Tinggi	4	13.83
Total	30	100

(Sumber : Hasil Analisis, 2019)

Berdasarkan tabel 7, sebanyak 86.7 % responden berpendapat bahwa intensitas penyuluhan yang di berikan selama ini tergolong sedang, sebanyak 13.3 % responden berpendapat bahwa intensitas penyuluhan selama ini tergolong tinggi. Pemahaman masyarakat tentang pengelolaan hutan kemasyarakatan

dipengaruhi oleh intensitas penyuluhan yang diberikan pihak terkait. Semakin tinggi intensitas kegiatan penyuluhan, akan semakin tinggi akses informasi. Hal ini secara nyata memberi pengaruh bagi peningkatan kualitas partisipasi petani dalam kegiatan pengelolaan hutan kemasyarakatan.

#### b. Tingkat Partisipasi Petani Untuk Kelompok Tani Hutan (KTH)

Partisipasi petani merupakan keikutsertaan dari petani baik secara individu maupun kelompok. Kelompok tani yang secara struktural memiliki kepengurusan berupa ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, Serta memiliki aturan-aturan keorganisasian.

Tabel 8. Tingkat Partisipasi Masyarakat Untuk Kelompok Tani Hutan (KTH).

Tingkat Partisipasi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Rendah	0	0
Sedang	2	6.67
Tinggi	28	93.33
Total	30	100

(Sumber : Hasil Analisis, 2019)

Berdasarkan Tabel 12 Sebagian besar responden (93.33%) ikut dalam kegiatan kelompok tani hutan Sisere Jaya. Kegiatan yang dilakukan misal pertemuan kelompok untuk membicarakan apa saja yang akan dilakukan dalam proses perencanaan pengelolaan hutan kemasyarakatan agar tercapainya tujuan bersama kelompok tani hutan tersebut. Untuk mewujudkan partisipasi petani secara aktif makan tujuan harus sejalan dengan kepentingan petani yaitu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraanya. (Supardi, 2007).

#### c. Tingkat Partisipasi Petani Untuk Akses Informasi

Akses informasi diukur dari tingkat aksesibilitas responden terhadap saluran informasi. Adapun saluran informasi yang dimaksud antara lain media elektronik, radio, televisi, dan handphone; media nonelektronik seperti surat kabar dan majalah serta saluran informasi yang bersifat interpersonal, seperti penyuluh dan sesama petani akses informasi disajikan dalam table 9.

Tabel 9. Tingkat Partisipasi Petani Untuk Akses Informasi.

Tingkat Partisipasi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Rendah	0	0
Sedang	26	86.67
Tinggi	4	13.33
Total	30	100

(Sumber : Hasil Analisis, 2019)

Berdasarkan tabel 10. Sebanyak 86.67 % responden tergolong sedang dalam hal mendapatkan informasi mengenai peegelolaan hutan kemasyarakatan,dan 13.3 % responden tergolong tinggi dalam hal mendapatkan informasi mengenai pengelolaan hutan kemasyarakatan.

#### d. Tingkat Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di kategorikan menjadi tinggi, seedang , rendah lebih jelasnya disajikan pada tabel 10.

Tabel 10. Tingkat Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Hutan kemasyarakatan (HKm).

Tingkat Partisipasi	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Rendah	0	0
Sedang	7	23.33
Tinggi	23	76.67
Total	30	100

(Sumber : Hasil Analisis, 2019)

Tabel 14 menunjukkan tingkatan partisipasi keseluruhan petani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan dari faktor keseluruhan faktor internal maupun faktor eksternal. Tingkat partisipasi petani tergolong tonggi dengan persentase 76.67%.

Tingkat partisipasi masyarakat merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan program partisipatif. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal masyarakat. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan salahsatu penyebab masyarakat tidak memiliki pekerjaan tambahan atau pekerjaan selain menjadi petani atau buruh tani sehingga menjadikan masyarakat ikut dalam mengelolaa hutan

kemasyarakatan. Disamping faktor internal, keberhasilan petugas pendamping dalam memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat, keaktifan para petani ikut dalam pertemuan Kelompok Tani Hutan, dan Akses Informasi tentang pengelolaan hutan kemasyarakatan yang diperoleh petani dari berbagai sumber baik dari sosialisasi, penyuluhan, maupun media massa atau internet. Muis (2007), yang menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat internal dan eksternal.

### **Level Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan**

Arnstein membagikan tingkatan partisipasi dalam 8 tingkatan level partisipasi dari level terbawah sampai level teratas yaitu : manipulation, therapy, Informing, consultation, placation, partnersip, delegeted power, citizen coontrol. Berdasarkan teori Arnstein tersebut ditemukan bahwa Level partisipasi Petani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan yakni pada tahap perencanaan masuk dalam level partnership pada tingkat ini kekuasaan disalurkan melalui negosiasi antara pemerintah dan petani. Masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau Pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi. Mereka sepakat untuk sama-sama memikul tanggung jawab dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Pada tahap perencanaan petani diberikan ruang dalam menentukan jenis bibit dan lokasi penanaman kemudian yang menyediakan bibit adalah pemerintah. Penentuan luasan Hutan Kemasyarakatan seluas 500 Ha dari kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Pada tahap perencanaan keterlibatan Ketua Kelompok Tani Hutan Sisere Jaya mengajukan Proposal kepada instansi yang terkait kemudian pengadaan bibit yang diminta yakni bibit palapi dan cengkeh , lokasi nya di Dusun 4 Sisere yang

menentukan lokasi tersebut yakni kepala desa dan ketua kelompok tani karna yang paling menegetahui kondisi tanah adalah masyarakat. Sherry Arnstein (1969) menggambarkan tingkatan dalam partisipasi masyarakat. Partisipasi menurutnya dibagi-bagi kedalam tiga level utama, yaitu: *nonparticipation (manipulation dan therapy)*, *degree of tekonism (informing, consultation, placation)*, dan *degree of citizen power (partnership, delegated power, dan citizen control)*. Secara lebih spesifik, partnership mengasumsikan bahwa kekuasaan didistribusikan antara masyarakat dan pemegang kekuasaan lainnya. Sedangkan menurut Hetifah (2009), *partnership* dilaksanakan untuk mencapai tujuan *governance* dan memiliki tiga prinsip dasar. Ketiga prinsip dasar dalam *partnership* tersebut adalah prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Pemerintah memperlakukan masyarakat sebagai partner kerja, mereka bersama-sama dalam menyusun dan melaksanakan program kerja. Pada level partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar. Kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Kepada masyarakat yang selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dan melakukan kesepakatan.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil yang di peroleh dari respon masyarakat terhadap hutan rakyat di Desa Mantikole dapat di simpulkan :

1. Tingkat Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan tergolong tinggi dengan persentase 76.67 % artinya petani berpartisipasi dalam kegiatan Kelompok Tani Hutan, aktif dalam mengikuti kegiatan penyuluhan sehingga informasi tentang pengelolaan HKm mereka bertambah



selain informasi dari penyuluhan akses informasi mereka dapatkan juga dari media massa/internet dan interaksi sesama petani melalui pertemuan kelompok.

2. Level partisipasi Petani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan yakni pada tahap perencanaan masuk dalam level Partnership. Kekuasaan disalurkan antara negosiasi pemerintah dan petani. Pemerintah memberlakukan petani sebagai partner kerja, mereka bersama sama dalam menyusun dan melaksanakan program kerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S 1969, *A Ladder of Citizen Participation*, Vol. 35, No. 4, hh. 216-224
- Arsyad, I dan S. Rahaijo. 2004. *Pengelolaan Hutan Lestari: Pembelajaran Dari Implementasi Manajemen Kolaboratif Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung Dalam : Prosiding Workshop Penguatan Desentralisasi Sektor Kehutanan Di Indonesia* (ed. L. Siswanti et.al.).
- Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala. 2013. *Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala*
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Luas Area Kehutanan*. Di akses dari <https://sulteng.bps.go.id/statictable/2016/07/28/589/luas-kawasan-hutan-ha-menurut-kabupaten-kota-dan-fungsinya-2011-2015-.html> di akses pada tanggal 13 juli 2018.
- Chamdi, A.N., 2003. *Kajian Profil Sosial Ekonomi Usaha Kambing Di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobongan*. Puslitbang Peternakan Departemen Pertanian. Bogor
- Corry W. 2009. *Teori Komunikasi*. Jakarta : PT. Ghalia Indonesia
- Darmasari, M. 2009. *Perencanaan dan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMP) di Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning.pdf*. Di akses tanggal 20 Juni 2018
- Derby Paranoan, Samuel A.P, Syamsudin M, 2012. *Pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Studi Kasus: Program GN-RHL BP-DAS Sadang Kabupaten Tana Toraja)*. Makassar
- Diniyati D, Awang SA. 2010. *Kebijakan penentuan bentuk insentif pengembangan hutan rakyat di wilayah gunung sawal kabupaten ciamis. dengan metoda ahp*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 7 (2): 129 – 143.
- Fauzi. A. 2009. *Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Hutan Rakyat (Kasus di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah)*. Tesis. Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
- Mamahit, R. 2013. *Tingkat Pendidikan, pelatihan dan kepuasan kerja pengaruhnya terhadap kinerja pegawai di badan penanggulangan bencana provinsi sulawesi utara*. *Jurnal EMBA*. 1(4); 936-945.
- Muis, H. 2007. *Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL)*. (Kasus: di kelurahan Layana dan kelurahan Lambara Kecamatan Palu Timur). IPB: Bogor.
- Nuraini, N. 2013. *Analisis Kualitas Hidup Petani Pangan di Desa Dringo kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo*. Malang.
- Pambudy R. 2003. *Penyuluhan dalam Sistem dan Usaha Agribisnis : Strategi . juu Pengembangan Manusia Indonesia*. Di dalam: Yustina I & Sudrajat A, editor. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Soekartawi. 2003. *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*. Jakarta: UI Press
- Supardi . 2007. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Waskito B. 2000. *Hutan Rakyat: Studi Kemungkinan Pengembangan*

(Kasus di Desa Gunungsari  
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah).  
Di dalam: Suharjito D, editor.  
Hutan Rakyat di Jawa. Bogor (ID):  
Fakultas Kehutanan IPB'

Widyawati. R.,F., dan Arif., P. 2013.  
Pengaruh Umur, Jumlah  
Tanggungan Keluarga, Luas  
Lahan, pendidikan, jarak tempat  
tinggal pekerja ke tempat  
kerja, dan keuntungan terhadap  
curahan waktu kerja wanita tani  
sektor pertanian di Desa Tajuk,  
kec. Getasan, Kab. Semarang.  
Diponegoro Journal Economics.  
2(3):1-14.